

**ANALISIS HUBUNGAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI
SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010-2019**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

TITLANDRIZA

2017/17043159

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

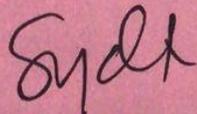
**ANALISIS HUBUNGAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI
SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010-2019**

Nama : Titi Andriza
NIM/TM : 17043159/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2022

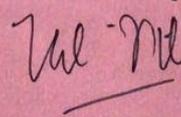
Disetujui Oleh :

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Analisis Hubungan Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi
Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2019

Nama : Titi Andriza

NIM/TM : 17043159/2017

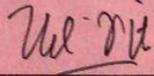
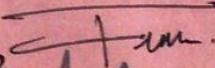
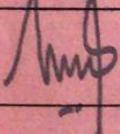
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2022

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	1. 
2	Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3	Anggota	: Mia Angelina Setiawan, SE, M. Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titi Andriza
NIM/TM : 17043159/2017
Tempat/tgl lahir : Bukittinggi/28 Oktober 1998
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl.Soekarno Hatta RT001/RW002, Garegeh
No. HP : 082241357095/082163650311
Judul Skripsi : Analisis Hubungan Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2019

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah di tanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pertanyaan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karna karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Titi Andriza
NIM. 17043159

ABSTRAK

Andriza, Titi. 17043159/2017. “Analisis Hubungan Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2019”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing: Nelvirita SE., M.Si.,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara efektivitas, efisiensi dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Populasi penelitian ini adalah seluruh pajak dan retribusi sektor pariwisata Kota Bukittinggi. kota Bukittinggi dengan menggunakan metode teknik sampel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan uji korelasi. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga dapat menjelaskan lebih detail hubungan/hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sektor pariwisata di Kota Bukittinggi memiliki tingkat efektivitas rata-rata 88% yang tergolong efektif dan memiliki hubungan linier negatif sempurna terhadap pendapatan asli daerah, efisiensi sektor pariwisata di Kota Bukittinggi memiliki efisiensi rata-rata. tingkat 14% tergolong efisien dan memiliki hubungan linier positif sempurna terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi sektor pariwisata Kota Bukittinggi memiliki tingkat kontribusi rata-rata sebesar 43% yang tergolong memberikan kontribusi baik dan memiliki hubungan linier sempurna terhadap pendapatan asli daerah.

**Kata kunci : Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Sektor Pariwisata dan
Pendapatan Asli Daerah**

ABSTRAK

Andriza, Titi. 17043159/2017. “Analisis Hubungan Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2019”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing: Nelvirita SE., M.Si.,Ak

The purpose of this study is to find out how the relationship between the effectiveness, efficiency and contribution of the tourism sector to the local revenue of the city of Bukittinggi from 2010 to 2019. The research population is all taxes and levies on the tourism sector of the city of Bukittinggi using the sample technique method. This study uses a quantitative method with a descriptive approach and correlation test. The novelty of this research is to examine the relationship of each independent variable to the dependent variable so that it explains in more detail the relationship/relationship. The results show that the effectiveness of the tourism sector in Bukittinggi City has an average effectiveness level of 88% which is classified as effective and has a negative perfect linear relationship to local revenue, the efficiency of the tourism sector in Bukittinggi City has an average efficiency level of 14% classified as efficient and has Positive perfect linear relationship to local revenue and contribution of the tourism sector Bukittinggi City has an average contribution rate of 43% which is classified as making a good contribution and has a perfect linear relationship to local revenue.

Keywords : Effectiveness; Efficiency; Contribution; Tourism Sector; and Local Government Revenue.

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya dengan memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hubungan Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2019”**. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Sallam yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta memperluas khasanah ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu berkontribusi berupa literasi bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, motivasi, dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Penulis secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Padang beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si serta wakil dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku ketua dan sekretaris jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang banyak memberikan arahan kepada penulis sebagai mahasiswa akuntansi. Dan bang Rizky selaku tenaga administrasi Program Studi Akuntansi yang baik, pengertian, *fast respon* terhadap mahasiswa tingkat akhir.

4. Ibu Nayang Helmayunita, SE., M.Sc selaku pembimbing akademik sekaligus seperti orang tua bagi penulis yang membantu berbagai persoalan berkaitan dengan akademik perkuliahan.
5. Ibu Nelvirita SE., M.Si.,Ak selaku pembimbing skripsi yang sangat baik hati, penyayang, berhati lembut, responsive serta tauladan bagi penulis yang tidak hentinya membimbing, memotivasi, memberikan arahan terkait penyelesaian skripsi ini. Terima kasih Ibu semoga keberkahan dan nikmat selalu tercurahkan untuk Ibu, dan semoga dilancarkan penyelesaian perkuliahan S3 yang sedang ditempuh.
6. Bapak Fefri Indra Arza, SE.,M.Sc., Ak dan Ibu Mia Angelina Setiawan SE., M.Si selaku dosen penelaah dan penguji yang memberikan masukan serta kritik yang membangun dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tercinta Bapak Herman dan Ibu Risda yang alhamdulillah hingga sekarang masih menemani perjuangan penulis dan tanpa henti memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, perhatian dan cinta tulusnya. Dan adik bungsu Adinda yang tengah berjuang akan masuk ke perguruan tinggi, dengan kesibukannya masih dapat menjadi segalanya bagi penulis, memberikan keceriaan, pengertian, do'a serta *support* yang luar biasa sehingga memacu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kakak tercinta Herda Susanti S.Kom dan Bang Yosefrizal S.Kom., M.Kom telah memberikan fasilitas serta berperan sungguh penting dari segi finansial, memberikan dukungan dan motivasi semoga Allah SWT senantiasa membalas berbagai kebaikan kakak dan abang dengan hal terbaik. Untuk kak Ayu Nirmala Sari S.Pd., M.Si dan Uda Dr. Diky Setya Diningrat S.Pd senantiasa memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis agar lebih giat dalam menyelesaikan

perkuliahan. Dan tak lupa Uda Toton, Uda Riko, Kak Amelia, Ponakanku Abiyyu, Azzahra, Ara, Fatih, Kirana, Lala, Shanum terimakasih banyak atas segalanya.

9. Rekan seperbimbingan Gian Javier Fausta sahabat layaknya abang yang menemani, berjuang bersama, membangkitkan semangat hingga akhirnya selesai dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat terbaikku Nabila dan Mansur yang tidak kenal lelah menemani dan saling berbagi satu sama lain, memberikan dukungan serta memberi warna kepada penulis selama perkuliahan. Zulfa dan Suci yang baik hati dalam memberikan arahan penyelesaian skripsi ini. *Loveyoumore*.
11. Sahabat dan saudaraku Nadya (Dajon), Wilda (WW), Esa, Nadia, Puty, Gheza, Agnesya, Gema, Ola, Melia, Silvia, Ninda senantiasa selalu meluangkan waktu memberikan arahan dan suka duka untuk penulis. Angga, Dika Budi, Rizki, Nico dan Willy abang sekaligus sahabat tanpa pamrih dalam berbagai hal. Meisya, Astria, Nadila yang mengisi hari-hari stres selama penyelesaian skripsi. Eja, Wella dan Anggun anggota Bala Squad sahabat pertama di akuntansi yang disela kesibukan masih bisa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penulis. Terspesial kepada 'Ulya tak henti sudah 17 tahun bersahabat memberikan semangat tak henti ditengah kesibukan perkuliahan masing-masing.
12. Untuk rekan-rekan BEM FE, REMESTA, Genbi Sumbar, Festival Pemuda 2019, IMABU, Duta Pemuda Bukittinggi, Duta GenRe Kabupaten Agam, para senior dan junior memberikan semangat dan pengalaman terbaik di bangku perkuliahan.
13. Akuntansi D 2017 yang memberikan warna indah, amanah dan rumah terbaik dalam berbaur berjuang selama masa perkuliahan.
14. Sangat istimewa kepada diri sendiri yang mampu bertahan, bersyukur, mau

menguatkan hati untuk berjuang sejauh ini walaupun badai dan luka selalu menghampiri.

15. Diky Wahyudi yang memberikan perhatian, kepedulian, perasaan serta sisi pandang cara berjuang untuk penulis
16. Kos Pinang Sori 2 yakni Hana, Ivo dan adikku Oya yang menjadi teman bercerita dan berjuang dalam masa perkuliahan.
17. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan dari segala pihak dibalas Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda serta bernilai ibadah di sisi-Nya. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembacanya. Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis, skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penyajiannya Namun kritik dan saran tetap penulis harapkan demi perbaikan ke arah yang lebih baik. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Terimakasih

Padang, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA	
KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	9
A. Kajian Teori	9
1. Teori Stewardship/ <i>Stewardship Theory</i>	9
2. Pendapatan Asli Daerah	10
3. Efektivitas	14
4. Efisiensi	17
5. Kontribusi	20
6. Pariwisata.....	21
7. Objek Wisata	22
8. Retribusi.....	23
9. Pajak Hotel	26
10. Pajak Restoran	26
11. Pajak Hiburan	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Penurunan Hipotesis	31
D. Kerangka Konseptual.....	35
E. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Jenis dan Objek Penelitian	36
B. Populasi dan Sampel	37
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Variabel Penelitian	38
F. Pengukuran Variabel	39
G. Teknik Analisis Data	42
H. Definisi operasional	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Jenis dan Objek Penelitian	47
B. Deskripsi Data	48
C. Teknik Analisis Data	50
D. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Pembahasan	68
C. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Prosedur Penentuan Data	48
Tabel 2 Pendapatan Asli daerah Kota Bukittinggi	48
Tabel 3 Pendapatan Sektor Pariwisata.....	49
Tabel 4 Rasio Efektivitas Sektor Pariwisata	51
Tabel 5 Rasio Efisiensi Sektor Pariwisata	53
Tabel 6 Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata	55
Tabel 7 Uji Statistik Deskriptif	57
Tabel 8 Uji Normalitas	58
Tabel 9 Uji Korelasi Efektivitas.....	59
Tabel 10 Uji Korelasi Efisiensi	60
Tabel 11 Uji Korelasi Kontribusi	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Penelitian DPKDAD Kota Bukittinggi	80
Lampiran 2 Tabulasi Data Target Penerimaan Sektor Pariwisata	81
Lampiran 3 Tabulasi Dara Realisasi Penerimaan Sektor Pariwisata	82
Lampiran 4 Tabulasi Data Biaya Pungutan Sektor Pariwisata ..	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 terkait Pemerintah Daerah, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 terkait Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait Otonomi Daerah yang berisikan pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dengan tujuan terciptanya kemandirian agar dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi pendapatan asli daerah tersebut sehingga tercapainya efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan kontribusi pelayanan terhadap masyarakat memunculkan dampak terhadap pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang perekonomian nasional.

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam perekonomian nasional salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu

indikator penting dalam mengatur keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan otonomi daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam pengelolaan daerahnya yang dapat menjadi sebuah bukti maksimal atau tidaknya pengelolaan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diatur pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerimaan beberapa sektor di setiap daerah diharapkan dapat mendukung asal pembiayaan daerah pada penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagai akibatnya dapat membantu menaikkan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah. Upaya peningkatan PAD salah satunya melalui peningkatan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta efektifitas pemungutan melalui mengoptimalkan potensi yang ada dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiana, 2021).

Tujuan PAD tercantum dalam Bab II UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 3 ayat 1 tertera bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemda untuk melakukan pendanaan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pajak daerah dan retribusi daerah juga menjadi komponen penting dalam sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting berperan dalam pembangunan daerah serta pembiayaan penyelenggaraan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah.

Adanya upaya peningkatan pendapatan daerah penting dilakukan salah satunya melalui peninjauan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah. Retribusi merupakan pungutan sebagai pemberian izin khusus atau pembayaran jasa dari pemerintah daerah terhadap badan ataupun pribadi. Retribusi terbagi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Sari, 2014).

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang berjudukan Kota Wisata dengan berbagai sektor pariwisata terdiri atas hotel-hotel, restoran, hiburan dan penggerak di bidang pariwisata. Kota ini mengambil kebijakan yang bijaksana dengan memberikan kewenangan dalam berinovasi terkait pariwisata daerah yang berkomitmen melalui anggaran dalam mengambil manfaat sebagai peningkatan pendapatan asli daerah terdiri atas sektor pendidikan sektor kesehatan, sektor perdagangan dan jasa serta sektor kepariwisataan. Sedangkan melalui peran sektor pariwisata berupa gerak lingkup berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan pariwisata. Pemerintah memperlihatkan upaya yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah yang berasal dari dana komponen pendapatan asli daerah di bidang pariwisata. Adanya

perkembangan sektor pariwisata menunjukkan peran aktif yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah terkhusus bagi pariwisata berbasis bisnis dari tingkatan kecil hingga tingkatan yang besar (Dritsakis, 2004). Melalui objek ini dari segi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran serta retribusi sektor pariwisata adapun upaya peningkatan pendapatan melalui pajak ataupun retribusi sektor pariwisata akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang benar dalam meningkatkan pelayanan publiknya yang memperlihatkan dalam proporsi belanja pembangunan serta dapat menjadi penghasil devisa tertinggi (Julastiana, 2012). Tentu dengan adanya sumbangan tersebut terjadi pengelompokan baik target, realisasi dan biaya operasional/ biaya pungutan dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan sektor pariwisata dengan memberikan dampak baik skala kecil ataupun besar.

Lingkup sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang memiliki subsektor dalam pengembangan berdasarkan asal pendapatan daerah bersifat unik, kompleks menggunakan industri-industri klasik, industri kerajinan, transportasi, cendera mata, penginapan, multidimensi baik sosial, ekonomi, fisik, budaya dan politik. Dari segi ekonomi, pariwisata menciptakan permintaan konsumsi ataupun investasi yang gilirannya menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Terkait pemenuhan permintaan dibutuhkan adanya investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan produk konsumen, industri jasa rumah makan dan sebagainya. Program pengembangan dan eksploitasi sumber daya dan potensi pariwisata diharapkan memberikan sumbangan yang lebih dalam pembangunan ekonomi baik skala mikro ataupun makro (Luciana, 2021). Perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi sektor pariwisata ini sebagai sarana memperlihatkan adanya peningkatan atau penurunan, tercapai atau tidaknya dalam hal pengelolaan sektor pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap

pendapatan asli daerah (Setiono, 2018). Sehingga peneliti tertarik mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata Kota Bukittinggi tahun 2010-2019 serta hubungannya terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan Jaya *et all.*, (2019) berjudul Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang menjelaskan kedua variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya dampak dalam peningkatan jumlah pendapatan asli daerah Kota Batam. Efisiensi penerimaan pajak hotel dalam kategori sangat efisien tahun 2013-2018 dengan rata-rata sebesar 47,87% yang artinya setiap satu satuan biaya yang digunakan dalam pengumpulan pajak akan menghasilkan 47,87% sedangkan untuk efektivitasnya rata-rata tergolong kategori sangat efektif. Saran untuk penelitian ini adanya penambahan variabel dan melanjutkan penelitian dengan tahun-tahun berikutnya ataupun bisa menambah objek penelitiannya.

Penelitian selanjutnya oleh Kritianti (2017) dengan judul Efektivitas Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganyuk Tahun 2013-2016 memaparkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dijelaskan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh terhadap PAD sehingga pemungutannya tentu sudah dilakukan secara efektif, efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tersebut mengukur hubungan antara hasil pungutan dengan potensi pada pajak itu sendiri yang jika pemungutan dilakukan secara efektif maka mengoptimalkan penerimaan sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah. Begitu juga dengan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan besarnya sumbangan yang diberikan sehingga peranannya terhadap PAD juga

semakin besar. Saran penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel serta pengembangan objek penelitian yang masih sinkron dengan penelitian ini menambahkan untuk meneliti tahun-tahun selanjutnya.

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini tak lepas dari ingin memberikan pengembangan serta menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbeda objek penelitian, lokasi pengujiannya serta penggunaan metode pengujiannya yakni analisis linear sederhana dan korelasi sederhana. Penelitian ini meneliti Kota Bukittinggi yang berada di kawasan Sumatera Barat yang sedang gencar dalam menunjang perkembangan pariwisata serta ekonomi kreatif agar terjadi peningkatan pemasukan daerah dari tahun ke tahun. Harapannya penelitian ini menghasilkan *output* penelitian yang sama atau memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang peninjauannya melalui variabel penelitian efektivitas, efisiensi dan kontribusi yang dapat memberikan relevansi hasil penelitian yang terbaru supaya dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya. Maka, tujuan penelitian ini menganalisis serta mengetahui hubungan tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi tahun 2010-2019. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hubungan Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat hubungan antara efektivitas sektor pariwisata dengan pendapatan asli daerah?

2. Apakah terdapat hubungan antara efisiensi sektor pariwisata dengan pendapatan asli daerah?
3. Apakah terdapat hubungan antara kontribusi sektor pariwisata dengan pendapatan asli daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hubungan tingkat efektivitas sektor pariwisata Kota Bukittinggi tahun 2010-2019 terhadap pendapatan asli daerah.
2. Mengetahui hubungan tingkat efisiensi sektor pariwisata Kota Bukittinggi tahun 2010-2019 terhadap pendapatan asli daerah.
3. Mengetahui hubungan tingkat kontribusi sektor pariwisata Kota Bukittinggi tahun 2010-2019 terhadap pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak, khususnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat menambah cakrawala dan pengetahuan berfikir dalam pengembangan wawasan terkait sektor publik berupa sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah dan sebagai media ajang ilmiah penerapan teori yang diperoleh dalam masa perkuliahan dengan penerapannya di lapangan.
2. Bagi akademik, dapat menambah wawasan yang dijadikan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi pemerintah, dapat dijadikan gambaran terkait perkembangan sektor pariwisata yang lebih baru, sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah

(Pemda) dalam menetapkan suatu kebijakan terbaru terkait sektor publik terkhusus bidang pariwisata.

BAB II

KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, PENURUNAN HIPOTESIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Stewardship/*Stewardship Theory*

Menurut Donalson dan Davis (1989) dalam Raharjo (2007) *stewardship theory* diperkenalkan sebagai teori yang didasarkan terhadap premis dan perilaku. Teori ini menjelaskan adanya kesuksesan dan kepuasan organisasi, yang menjelaskan para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih tertuju kepada sasaran dan mengutamakan *output* untuk kepentingan organisasi. Pemerintah selaku *steward* yang berkedudukan sebagai pengelola sumber daya dan rakyat sebagai *principal* pemilik sumber daya. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan/jasa kepada publik dengan pertanggungjawaban yang penuh terhadap masyarakat (publik). Mengacu terhadap teori *stewardship*, perilaku *steward* merupakan tergolong kolektif yang menyesuaikan dengan tujuan organisasi. Perilaku ini akan memberikan suatu profit terhadap *principal* termasuk *side owner* melalui dampak positif yang diberikan (Raharjo, 2007).

Pendekatan teori ini berawal dari ilmu psikologi dan sosiologi yang didesain agar membentuk suatu perilaku yang mengacu ke arah perilaku melayani. *Steward* serta melindungi serta memaksimalkan *shareholder* melalui kinerja perusahaan. Sudaryo (2017) menyatakan *stewardship theory* adalah situasi manajemen berperilaku berdasarkan kepentingan pemilik/masyarakat dan bertindak dengan

pertimbangan secara logis dan nyata dalam memprioritaskan kepentingan lingkup luas untuk mencapai tujuan organisasi.

Pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang tergabung dalam sektor pariwisata atau bisa disebut dengan subsektor pariwisata baik mengelola ataupun bertanggung jawab atas pengelolaan daerahnya masing-masing. Implikasi teori terhadap penelitian ini yakni eksistensi memposisikan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dipercayakan dalam hal pengelolaan, membuat pertanggungjawaban keuangan atas penyajian realisasi pendapatan daerah serta menampung berbagai aspirasi dan suara masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang menghasilkan *good governance* dalam pengelolaan sektor pariwisata (Anisa, 2012).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut menurut peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, *output* pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu, sumber-sumber PAD sepatutnya dicari secara terus menerus supaya dipakai menjadi pembiayaan pengeluaran rutin dan otonomi daerah.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah dan retribusi daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan daerah dari daerah yang bersangkutan, pajak daerah dan pengelolaan administrasi yang terpisah dari properti serta hasil utama non-hukum yurisdiksi Ini berusaha untuk mengidentifikasi kapasitas daerah dari

perspektif keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Apabila melihat struktur pendapatan daerah, maka struktur pendapatan daerah menjadi penting dengan kata lain, semakin besar wilayahnya, semakin besar tanggung jawab dapat diambil oleh wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka sentra terhadap pusat semakin besar (Ifa, 2017). Adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah akan membuat kondisi kelancaran pembangunan di berbagai sektor seperti pembangunan fasilitas umum, jalan dan fasilitas lainnya. Pendapatan asli daerah dapat dialokasikan untuk kegiatan publik yang merupakan salah satu harapan masyarakat kepada pemerintah pada era desentralisasi fiskal (Kawa, 2011). Menurut Halim (2010), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut menurut peraturan daerah sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan kategori sangat krusial yaitu sektor ini bisa meninjau sejauh mana daerah dapat membiayai aktivitas pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan berdasarkan Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: $PAD = Pajak\ daerah + Retribusi\ daerah + Hasil\ pengelolaan\ kekayaan\ daerah\ yang\ dipisahkan + Lain-lain\ PAD\ yang\ sah.$

Berdasarkan yang tercantum dalam Bab II UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 3 ayat 1

tertera bahwa tujuan PAD menaruh wewenang kepada Pemerintah Daerah perihal mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam peraturan ini menjelaskan PAD terdiri dari:

- a. Retribusi Daerah
- b. Pajak Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (mencakup *output* penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai hasil penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut Mosal (2013) Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 memaparkan sumber-sumber PAD terdiri atas:

1. Hasil Retribusi Daerah
2. Hasil Pajak Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Halim (2007), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Kabupaten/ Kota
 - b. Pajak Provinsi
- 2) Retribusi Daerah, terbagi menjadi: Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, misalnya: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau eksploitasi kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, laba selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh suatu daerah.

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri atas komponen, yaitu:

- 1) Pendapatan Transfer
- 2) Pendapatan Asli Daerah
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal satu ayat 18 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemda dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sukardi (2011) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan pada Daerah (Deppen RI, 1992), menjelaskan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah mencakup pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak bahan galian golongan C, pajak air bawah tanah dan air permukaan, tunggakan pajak dan denda pajak.

2. Hasil retribusi daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, porto cetak akte dan KTP, biaya pasar, parkir, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, terminal, pesanggrahan, rumah potong hewan, penyedot kakus tempat rekreasi dan olah raga, penjualan bisnis daerah, ijin mendirikan gangguan, ijin bangunan, ijin trayek.
3. Hasil perusahaan daerah meliputi perusahaan air minum, bank pembangunan daerah BPR/BKK.
4. Lain-lain bisnis daerah yang sah meliputi hasil penjualan milik daerah, jasa giro, ganti rugi atas kekayaan daerah.

Menurut Kristianti (2019), pendapatan sektor pariwisata bersumber dari retribusi daerah melalui biaya pungutan, biaya berbagai objek wisata, serta penyewaan gedung olahraga dan seni serta sektor pariwisata juga memberikan pendapatan lain bagi pemerintah melalui pungutan pajak seperti hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi ataupun pajak lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan masing-masing daerah.

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah. Rumus PAD yaitu total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain – lain pendapatan daerah yang sah.

3. Efektivitas

Menurut Djumhana (2007), efektivitas merupakan suatu keadaan yang mendeskripsikan tingkat pencapaian *output* program sesuai target yang ditentukan atau dapat diartikan secara sederhana yaitu perbandingan antara *outcomes* dengan

output. Halim (2004) menyampaikan efektivitas dapat memperlihatkan bahwa hubungan interaksi keluaran suatu pertanggungjawaban menggunakan suatu pencapaian yang direncanakan dengan kondisi semakin besar keluaran yang diperoleh terhadap nilai pencapaian target. Efektivitas yang tergambarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah cerminan atas kemampuan pemerintah daerah pada pelaksanaan realisasi perencanaan pendapatan asli daerah yang dibandingkan menggunakan sasaran yang ditetapkan sinkron menggunakan potensi riil suatu wilayah (Puspitasari, 2014). Devas, *et al.*, (1998) menjelaskan efektivitas dapat diartikan juga sebagai hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya mesti sedemikian rupa sehingga program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan alokasi biaya seminim mungkin dalam rentang waktu yang secepatnya.

Efektivitas menerangkan keberhasilan ataupun kegagalan pada pencapaian tujuan yang bisa dikatakan pula efektif adalah refleksi dari *output*. Efektivitas berbanding lurus dengan pencapaian tujuan atau dapat dikatakan sebagai target kebijakan (hasil guna) yang dimaknai dengan hubungan antara keluaran terhadap tujuan yang memang harus dicapai. Indikator efektivitas menggambarkan secara jelas jangkauan sebab-akibat serta dampak (*outcome*) dari keluaran program dalam mencapai targetnya, semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan pada sasarnya maka semakin efektif suatu kinerja unit organisasi (Mardiasmo, 2002).

Yoduke (2015) menjelaskan efektivitas dikatakan menjadi interaksi antara *output* yang dibutuhkan menggunakan *output* sesungguhnya dicapai atau interaksi hasil dengan tujuan. Apabila organisasi sudah berhasil mencapai tujuan, maka organisasi bisa dikategorikan kedalam kategori efektif. Efektivitas tidak menyatakan besarnya biaya yang sudah dianggarkan tetapi hanya melihat sejauh mana suatu program/aktivitas sudah mencapai tujuan yang ditetapkannya.

Menurut Halim (2010), efektivitas merupakan interaksi antara hasil sentra dan tanggungjawabnya dan tujuannya, semakin besar kontribusi hasil terhadap tujuan semakin efektiflah satu unit tersebut. Dapat disimpulkan efektivitas juga suatu keadaan yang menggambarkan taraf keberhasilan yang diukur menurut kualitas, kuantitas dan waktu sesuai yang direncanakan serta menyebutkan data yang akan diteliti dari efektivitas berupa efektivitas penerimaan realisasi daerah besarnya peningkatan efektivitas pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dan retribusi dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata (PHR dan Retribusi)}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata (PHR dan Retribusi)}} \times 100\%$$

Muhktar (2016) menyatakan suatu pekerjaan dikategorikan efektif jika pekerjaan tersebut dapat merealisasikan tujuan yang direncanakan. Tentu efektivitas tidak hanya memberikan kesan atau pengaruh tetapi juga berhubungan terhadap tujuan, tata cara ataupun metode, fasilitas beserta prasarana juga ikut memberikan pengaruh sehingga disimpulkan efektivitas lebih terfokus pada hasil akhir.

Mahmudi (2011) menyatakan bahwa efektivitas yaitu suatu interaksi antara keluaran menggunakan tujuan atau target yang harus dicapai. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Klasifikasi taraf efektivitas sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% dikategorikan sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% dikategorikan efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% dikategorikan cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% dikategorikan kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% dikategorikan tidak efektif.

Martoyo (1998) mendefinisikan efektivitas menjadi suatu kondisi atau syarat dalam memilih tujuan yang perlu dicapai dan sarana yang akan dipakai serta kemampuan yang dimiliki adalah digolongkan menjadi tepat, sebagai akibatnya tujuan yang diinginkan bisa dicapai menggunakan *output* yang memuaskan. Dapat dirangkum bahwa efektivitas berfungsi sebagai alat ukur hubungan antara *output* pungutan suatu pajak atau retribusi menggunakan potensi pajak atau retribusi itu sendiri. Sedangkan efektivitas sektor pariwisata merupakan suatu alat pengukur interaksi antara *output* pungutan pajak dan retribusi sektor pariwisata dan potensi sektor pariwisata (Karina, 2016).

4. Efisiensi

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992) efisiensi merupakan perbandingan sumber dan hasil atau masukan dengan keluarannya sehingga dapat menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan dalam mencapai target dari kegiatan yang dilaksanakan atau pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan sumber sebagai upaya mencapai tujuan organisasi.

Menurut Halim (2010) Efisiensi merupakan suatu gambaran terkait besaran biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan pendapatan realisasi yang diterima. Suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika :

- 1). Menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.
- 2). Menggunakan sumber atau biaya atau masukan yang lebih kecil untuk menghasilkan keluaran yang sama.

Menurut Mardiasmo (2002), Pengertian efisiensi berkaitan erat dengan konsep produktivitas yang mana efisiensi dengan menggunakan perbandingan *output* yang telah dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*), Sehingga kategori efisiensi apabila suatu hasil produk atau *output* kerja tertentu dapat tercapai melalui dana dan sumber daya yang seminim-minimnya (*spending well*). Dijelaskan juga bahwa indikator efisiensi mendeskripsikan kaitan antara masukan sumber daya suatu organisasi seperti biaya administratif, staf dan upah serta hasil keluarannya. Informasi dari indikator tersebut terkait konversi masukan menjadi keluaran yakni proses internal dan efisiensi.

Menurut Mahmudi (2011) efisiensi merupakan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan sehingga menghasilkan *output* tertentu. Rumus perhitungan efisiensi yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Sektor Pariwisata (PHR dan Retribusi)}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PHR dan Retribusi)}} \times 100\%$$

Klasifikasi kriteria efisiensi dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian di atas 40% dikategorikan tidak efisien.
- 2) Tingkat pencapaian antara 31% - 40% dikategorikan kurang efisien.

- 3) Tingkat pencapaian antara 21% - 39% dikategorikan cukup efisien.
- 4) Tingkat pencapaian antara 10% - 20% dikategorikan efisien.
- 5) Tingkat pencapaian di bawah 10% dikategorikan sangat efisien.

Pemerintah daerah dikategorikan melaksanakan pemungutan secara efisien dalam kondisi jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100% yaitu semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik tingkat efisiensi pemerintah. Namun semakin besar rasio efisiensi maka semakin buruk tingkat efisiensi pemerintah. Adapun perlunya pemerintah daerah semestinya cermat dalam hal perhitungan biaya yang dikeluarkan dalam merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima (Mahmudi, 2011). Tak hanya itu, kondisi tersebut berguna walaupun pemerintah daerah telah berhasil merealisasikan sesuai target ataupun sasaran yang telah ditetapkan agar tampaknya arti keberhasilan dari besarnya biaya yang dikeluarkan realisasi pendapatan yang diterima lebih besar daripada realisasi target penerimaan pendapatan tersebut (Putri, 2010).

Acuan yang telah dijelaskan dapat digunakan dalam pengukuran efisiensi termasuk untuk penelitian ini dengan melakukan pengukuran terhadap efisiensi pariwisata agar dapat terlihat kecenderungan efisiensinya apakah semakin naik ataupun turun, atau justru relatif sama dengan tetap mengkategorikan semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja pariwisata semakin baik (Danyanto, 2016).

Menurut Oktarina (2010), Apabila dikaitkan terhadap penerimaan sektor pariwisata yang terdiri atas pajak hotel, pajak hiburan, pajak estoran dan retribusi, maka dapat dikatakan efisiensi menyangkut:

1. Cara/ ketentuan/ketetapan dalam mengelola pajak hotel/pajak restoran/pajak hiburan dan retribusi (tidak membuang biaya).

2. Kemampuan menjalankan tugas pemungutan pajak hotel/pajak restoran/pajak hiburan dan retribusi dengan baik.
3. Penggunaan jumlah lembaga/bahan yang sesuai standar yang sudah ditetapkan.
4. Perbandingan *output* (nilai realisasi penerimaan) dengan *input* (biaya, tenaga, sarana dan teknik/tata cara) dalam suatu proses.

5. Kontribusi

Kata kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan iuran uang atau sumbangan. Merujuk pada makna tersebut secara umum kontribusi dapat dijelaskan sebagai daya dukung atau sumbangsih terhadap suatu hal yang memberikan peran atas pencapaiannya yang lebih baik (KBBI, 2021).

Menurut Alhira 2016, kontribusi dalam Bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang artinya keikutsertaan, melibatkan diri, ketertiban ataupun sumbangan. Sehingga dapat dimaknai sebagai suatu objek yang berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas diberbagai bidang. Kontribusi diberikan sebagai sarana peningkatkan efisisensi dan efektivitas. Hal ini dilakukan dengan cara mempertegas posisi perannya, supaya tepat sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Menurut Karina (2016), kontribusi dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan biaya atau kerugian tertentu secara bersama.

Kontribusi dapat diartikan juga sebagai bantuan nyata berupa bantuan tenaga, bantuan uang/materi, bantuan pemikiran dan berbagai macam bantuan lainnya yang ditujukan pada kegiatan/aktivitas tertentu untuk membantu suksesnya mencapai tujuan bersama beserta target yang sudah direncanakan sebelumnya (Puspitayanti, 2019).

Mosal (2013) menyatakan kontribusi yang diberikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan hal yang dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya agar tepat sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan. Mahmudi (2016) mengemukakan semakin besar hasil kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak/retribusi terhadap PAD dalam dampak memberikan peningkatan, begitupun sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil dapat disimpulkan peranan pajak/retribusi terhadap PAD. Adapun rumus perhitungan kontribusi yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata (PHR dan Retribusi)}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi kriteria kontribusi dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian antara 0% - 10% tergolong sangat kurang.
- 2) Tingkat pencapaian antara 10% - 20% tergolong kurang.
- 3) Tingkat pencapaian antara 20% - 30% tergolong sedang.
- 4) Tingkat pencapaian antara 30% - 40% tergolong cukup baik.
- 5) Tingkat pencapaian antara 40% - 50% tergolong baik.
- 6) Tingkat pencapaian di atas 50% tergolong sangat baik.

6. Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1979, pariwisata adalah perwujudan dari cipta insan, rupan hayati seni budaya dan sejarah bangsa tempat atau keadaan alam yang akan memiliki daya tarik untuk dikunjunginya. Selain itu, pariwisata adalah suatu tanda-tanda sosial yang sangat kompleks menyangkut insan seutuhnya dan memiliki banyak aspek yaitu aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, ekologis, dan sebagainya. Aspek yang menjadi perhatian

khusus dapat dikategorikan satu-satunya aspek krusial yaitu aspek ekonomisnya, dapat dimaknai menjadi setiap perjalanan wisata orang harus mengeluarkan biaya yang nantinya diterima oleh orang-orang yang menyelenggarakan angkutan, menyediakan banyak sekali jasa-jasa, atraksi dan lain-lainnya sebagai akibatnya daerah yang dikunjungi wisatawan mendapatkan laba ekonomis yang nantinya sebagai tujuan pembangunan pariwisata (Setianingsih, 2006). Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 mengenai kepariwisataan pasal satu disebutkan pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait di bidang tersebut. Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, pariwisata adalah perwujudan cipta insan, tata hidup seni budaya serta sejarah bangsa tempat atau keadaan alam yang sanggup mempunyai daya tarik untuk dikunjunginya (Nuraina, 2014).

7. Objek Wisata

Objek wisata wajib didesain dan dibangun ataupun dikelola secara profesional sebagai akibatnya bisa menarik wisatawan untuk datang. Menurut Sari (2014), objek wisata adalah potensi pendukung pemancing datangnya wisatawan ke suatu wilayah tujuan wisata dengan unsur krusial misalnya daya tarik, prasarana wisata, prasarana akomodasi, prasarana pendukung, wahana wisata, infrastruktur. Potensi wisata bisa diartikan sebagai kemampuan daerah yang mungkin pada suatu daerah dimanfaatkan untuk pembangunan meliputi alam dan insan.

Pembagian objek wisata didasarkan oleh :

- a. Adanya aksesibilitas yang tinggi agar dapat mengunjunginya.

- b. Adanya sumber daya yang dapat menyebabkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- c. Objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi disebabkan keindahan alam sungai, pegunungan, pantai, hutan dan sebagainya.
- d. Adanya karakteristik spesifik yang bersifat langka.
- e. Objek wisata budaya memiliki daya tarik tinggi lantaran mempunyai nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung pada suatu objek buah karya manusia pada masa lalu.

8. Retribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan undang-undang. Menurut Mardiasmo (2011) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan retribusi daerah yang disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah yang digunakan sebagai pembayaran biaya atas jasa ataupun pemberian izin khusus disediakan atau diberikan pada pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau entitas/badan. Retribusi sektor pariwisata yaitu pungutan yang dibebankan kepada rakyat atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam sektor pariwisata (Jariyah, 2020).

Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan kembali dalam Peraturan Daerah (PerDa) Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2011, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan

atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang langsung atau badan.

Jenis – jenis retribusi jasa umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan
3. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte
4. Mayat
5. Retribusi Pelayanan Pemekaran dan Penguburan
6. Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
7. Catatan Sipil
8. Retribusi Air Bersih
9. Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
11. Retribusi Pelayanan Pasar
12. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
13. Retribusi Penggantia Biaya Cetak KTP

Selanjutnya retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah menggunakan prinsip komersial pada dasarnya dapat disuguhkan oleh sektor swasta. Pendapat lain juga menyatakan retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ifa, 2017).

Pembagiannya terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Pasar atau Pertokoan
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Tempat Penitipan Anak
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Penginapan / Persinggahan Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Tempat Pendaftaran
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga
11. Retribusi Penyeberangan di atas Air
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Sedangkan dalam retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka dalam dasarnya pemberian izin pada pemerintah daerah tidak wajib dipungut retribusi, akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Pemerintah daerah mungkin masih kekurangan dana yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah sebagai akibatnya terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi (Setiono, 2018).

Menurut Andriansyah (2014), jenis – jenis retribusi perizinan terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Trayek
3. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
4. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

5. Retribusi Izin Gangguan
6. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan

9. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang didasarkan pada penyedia pelayanan hotel ataupun bangunan khusus yang sudah disiapkan bagi orang atau tamu supaya dapat menginap, memakai fasilitas, mendapatkan setiap pelayanan serta fasilitas hotel lainnya dengan dikenakan tarif tertentu (Luwunaung, 2020). Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemungutan pada suatu daerah kabupaten/kota, terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah berkaitan dengan biaya operasional hotel (Senduk, 2020).

10. Pajak Restoran

Restoran merupakan tempat penyediaan makanan serta minuman yang dapat dipungut biaya, yang merupakan rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya. Berdasarkan Peraturan Perundang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Nomor 22 menyatakan pajak restoran adalah bagian dari pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel, pada Nomor 23 menjelaskan restoran merupakan fasilitas penyedia makanan ataupun minuman dengan pemungutan pembayaran yang mencakup kafetaria, rumah makan, warung, kantin, *bar* dan sejenisnya termasuk jasa catering maupun jasa boga. Perihal dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yaitu pengusaha restoran, restoran, pembayaran, bon penjualan dan tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (Luwunaung, 2020).

Pengertian restoran atau rumah makan menurut Keputusan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVV105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha jasa pangan adalah suatu usaha penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No.304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan yang dimaksud adalah suatu jenis usaha pangan yang memiliki tempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dalam proses pembuatan, penyimpanan, penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya (Fadly, 2020).

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima pihak restoran atas pelayanan yang disediakan. Pajak restoran dikenakan terhadap dua jenis restoran, yaitu rumah makan menggunakan *Bill* dan rumah makan penetapan (Aprialdi, 2017).

11. Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab I Pasal 1 Nomor 24 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dan Nomor 25 menjelaskan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, tontonan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan pembayaran. Wajib pajak pada pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan penetapannya didasarkan atas peraturan daerah. Objek pajak hiburan yakni jasa penyelenggaraan hiburan

dengan dipungut bayaran yaitu diantaranya tontonan film, pagelaran pameran, kesenian, karaoke, diskotik, sirkus, pusat kebugaran, busana, kontes, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap atau *spa*, pertandingan olahraga dan lain-lain. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Luwunaung, 2020).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Mardiana (2021) yang berjudul Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar menjelaskan bahwa hasil penelitiannya Pendapatan sektor pariwisata dari PHR dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Gianyar mempunyai kontribusi yang sangat tinggi terhadap pendapat asli daerah hingga mencapai rata-rata 47,71 persen. Pendapatan sektor pariwisata dari PHR dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2002 - 2017. Pendapatan sektor pariwisata dari PHR secara parsial berpengaruh positif serta signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2002 -2017. Pendapatan sektor pariwisata dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2002-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanipah tahun 2015 dengan judul Pengaruh efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus di Kota Bandung periode 2009-2013) memaparkan hasil penelitian berupa efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung

ditandai dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang jauh dibawah taraf signifikansi 0,05, dengan demikian ada pengaruh yang besar dihasilkan oleh ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependen ditandai dengan meningkatnya masing-masing perhitungan rasio efektivitas, efisiensi dan kontribusi.

Penelitian Shofiatul Mila *et all.*,(2021) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang menyatakan bahwa sesuai hasil analisis data, maka dirangkum efektivitasnya berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah serta kontribusinya juga berpengaruh positif terhadap PAD sehingga memberikan dampak semakin meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Batang disebabkan adanya upaya inovasi dari SAMSAT yang memberikan alternatif dalam memberikan layanan pembayaran pajak.

Selanjutnya, penelitian Kritianti (2017) dengan judul Efektivitas Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganyuk Tahun 2013-2016 memberikan hasil bahwa efektivitas pajak hotel, pajak restoran, kontribusi pajak hotel dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa variabel independen memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Penelitian yang dilakukan Lasmini (2019) berjudul Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016 menjelaskan efektivitas pajak hotel

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang menjelaskan bahwa jika efektivitas mengalami kenaikan maka PAD juga akan ikut meningkat. Hasil ini memberikan gambaran nilai positif yang ditunjukkan pengaruh efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah berbanding lurus atau disebut *linear*. Sehingga dapat dikatakan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sleman dikategorikan sudah efektif.

Berikutnya Wahyuni *et all.*,(2020), Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan rasio kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang mana angka positif yang diperlihatkan mengindikasikan ketika kontribusi pajak daerah meningkat maka pendapatan asli daerah tentu juga meningkat secara signifikan ataupun sebaliknya.

Sukmawati (2020), penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Dalam hasil penelitian terlihat bahwa kontribusi atas pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 35,2% artinya diketahui bahwasannya semakin tinggi atau baik penerimaan pajak reklame dan pajak restoran akan berbanding lurus terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Selanjutnya seperti penelitian Aznenda (2017) memberikan hasil berupa dari penelitian yang dilakukan berjudul Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014 menyatakan adanya pengaruh atas kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang bermakna semakin

meningkatnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran maka semakin meningkat penerimaan pendapatan asli daerah.

Penelitian Gunawan (2018) berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur menyatakan bahwa efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Rata-rata efektivitas pajak daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2011-2015 sangat efektif sebesar 111,78% dengan asumsi kinerja Pemerintah dinilai sangat baik dan relevan dikarenakan target pajak daerah yang menjadi tujuan tercapai. Dan rata-rata efektivitas retribusi Kabupaten Aceh Timur 2011-2015 sebesar 83,36% tergolong hanya sebatas cukup efektif dikarenakan masih belum maksimalnya penggalian potensi terhadap retribusi daerah tersebut. Hasil ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dinilai sangat baik karena target pajak dan retribusi yang ingin dicapai terealisasikan.

C. Penurunan Hipotesis

1. Efektivitas Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan teori efektivitas dapat menjelaskan efektivitas yang mana menjelaskan efektivitas merupakan ukuran kualitas *output* (Puspitasari, 2014). Ketika mengukur efektivitas menggunakan teori stewardship maka pemerintah daerah sebagai pihak pengelola dapat mengetahui apakah suatu investasi akan berguna sehingga dapat dikaitkan dalam upaya pengumpulan PAD ditimbulkan suatu hubungan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara realisasi PAD terhadap potensi efektivitasnya. Sehingga untuk pengukuran PAD jika persentase efektivitas diatas 100% maka tingkat efektivitasnya semakin baik yang juga

diartikan sebagai semakin tinggi tingkat efektivitas dari sektor pariwisata akan berpengaruh terhadap peningkatan realisasi pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2011).

Menurut penelitian terdahulu, Mardiana (2021) memaparkan sektor pariwisata dari pajak hotel, hiburan dan restoran dan tempat rekreasi dan olah raga secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar tahun 2002-2017. Secara parsial pendapatan sektor pariwisata memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Gianyar.

Selanjutnya penelitian Utami (2021) menjelaskan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan bahwa variabel independennya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan angka efektivitas sebesar 90,52% yang dikategorikan efektif.

Penelitian Gunawan (2018) bahwa efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata efektivitas senilai 111,78% dan 83,36% dalam kategori sangat efektif dan cukup efektif. Hal ini menunjukkan semakin naik efektivitas pajak daerah dan retribusinya maka akan semakin meningkat pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₁: Terdapat hubungan positif antara efektivitas sektor pariwisata dengan PAD.

2. Efisiensi Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Dwiyanto (2006), efisiensi merupakan kemampuan suatu unit usaha dalam mencapai tujuan yang diinginkan yang selalu dikaitkan dengan tujuan

organisasi yang harus dicapai oleh suatu lembaga. Semakin efisien sektor pariwisata maka dapat menutup untuk biaya operasional sehingga dapat menggambarkan sudah baik atau tidaknya dalam pengaplikasian pengelolaan pengutannya.

Menurut Jaya *et all.*, (2019) menjelaskan tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel tahun 2013-2017 masuk dalam kategori sangat efisien dengan rata-rata sebesar 47,87% Hasil pengujian hipotesis variabel efisiensi pajak hotel atau variabel menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif serta signifikan terhadap variabel dependen yakni pendapatan asli daerah ini menjelaskan bahwa variabel independen tentu memberikan kenaikan atau peningkatan jumlah nilai pendapatan asli daerah Kota Batam. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₂ : Terdapat hubungan positif antara efisiensi sektor pariwisata dengan PAD.

3. Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

Menurut teori kontribusi, kontribusi retribusi adalah seberapa besarnya pengaruh atau peran serta realisasi penerimaan terhadap pendapatan asli daerah. Diberlakukannya penelitian ini menggunakan teori stewardship pemerintah daerah sebagai lembaga pengelola, ketika suatu daerah dapat meningkatkan kontribusi PAD-nya tanpa membawa pengaruh negatif maka daerah tersebut dapat di kategorikan mampu dalam peningkatan kemandirian fiskalnya. Semakin besar kontribusi maka semakin besar peranan yang diberikan terhadap objek penelitian serta menunjukkan potensi dalam menyumbangkan pemasukan. Dalam penelitian

ini semakin tinggi tingkat kontribusi sektor pariwisata maka semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah.

Teori ini sesuai dengan beberapa penelitian yaitu Menurut Memah (2013), menyatakan secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

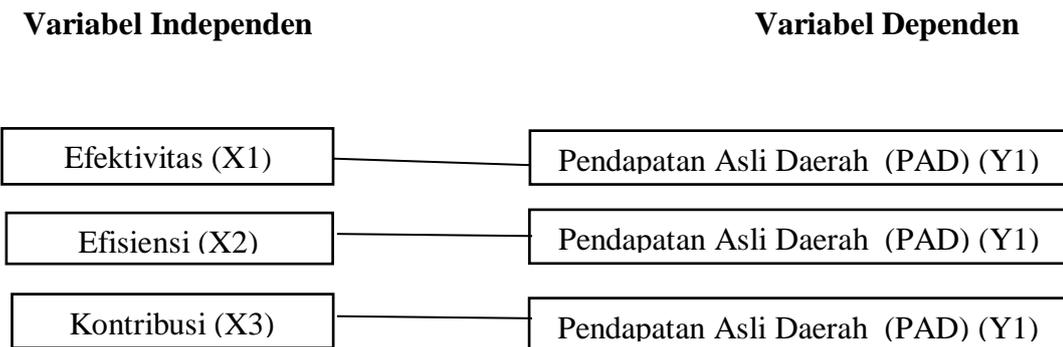
Menurut penelitian yang dilakukan Ersita (2016) menyatakan Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami perkembangan sampai 8%. Kemudian pada 2013 sampai 2014 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan kembali sebesar 8%, namun 2015, kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan dikarenakan menurunnya penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Hasil persentase rata-rata penerimaan retribusi dalam rentang interval memberikan kontribusi kategori sedang. Begitu juga menurut Kristiani (2019) dalam penelitiannya menyatakan variasi perubahan nilai variabel bebas kontribusi pajak restoran dapat menjelaskan variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah yang dimaknai bahwa semakin besar hasil kontribusi pajak restoran maka peranannya semakin besar terhadap PAD berlaku begitupun sebaliknya.

Menurut Mardiana (2021) memaparkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata selama delapan belas tahun otonomi daerah berlangsung menunjukkan kontribusi yang dominan dengan rata-rata 44,71 persen, dimana pendapatan sektor pariwisata dari pajak yaitu PHR menunjukkan angka kontribusi yang besar dengan rata-rata 40,63 persen. Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan dalam menunjang dan mendorong perolehan pendapatan asli daerah yang menunjukkan

rata-rata kontribusi PHR kontribusi pendapatan sektor pariwisata yang selama otonomi daerah sebesar 47,71 persen. Sesuai teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dari penelitian ini adalah

H₃ : Terdapat hubungan positif antara kontribusi sektor pariwisata dengan PAD.

D. Kerangka Konseptual



E. Hipotesis

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat hubungan positif antara efektivitas sektor pariwisata dengan PAD.

H2 : Terdapat hubungan positif antara efisiensi sektor pariwisata dengan PAD.

H3 : Terdapat hubungan positif antara kontribusi sektor pariwisata dengan PAD.

BAB V

PENUTUP

ii. Kesimpulan

Penelitian ini untuk menguji secara analisis pengaruh efektivitas, efisiensi dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas sektor pariwisata Kota Bukittinggi memiliki tingkat efektivitas rata-rata sebesar 88% tergolong kategori cukup efektif, memiliki hubungan linear sempurna negatif terhadap pendapatan asli daerah.
2. Efisiensi sektor pariwisata Kota Bukittinggi memiliki tingkat efisiensi rata-rata sebesar 14% tergolong kategori efisien, memiliki hubungan linier sempurna positif terhadap pendapatan asli daerah.
3. Kontribusi sektor pariwisata Kota Bukittinggi memiliki tingkat kontribusi rata-rata sebesar 43% tergolong kategori berkontribusi baik, memiliki hubungan linier sempurna terhadap pendapatan asli daerah.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha mengembangkan dan merancang penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Keseluruhan data terkait dengan penelitian ini diperoleh langsung dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi secara *offline* melalui

berbagai tahapan sesuai SOP disesuaikan dengan dinas terkait, data tersebut diasumsikan benar sesuai kenyataan di lapangan.

2. Kegiatan mengolah dan menganalisis data dalam menjawab rumusan masalah efektivitas, efisiensi dan efektivitas terhadap pendapatan asli daerah peneliti melakukan penyesuaian rumus dalam aplikasi pengolahan data yang digunakan.
3. Rendahnya koefisien determinasi efektivitas dan kontribusi sehingga memberikan sumbangan komponen yang cenderung kecil sehingga sulit menjelaskan hubungan terhadap variabel dependen.

C. Saran

Penulis menyadari masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini masih dalam kategori belum sempurna. Namun demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada seluruh pihak. Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan diatas, maka penulis berkesempatan untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kota Bukittinggi lebih khusus dalam meningkatkan ataupun mempertahankan pengawasan terhadap efektivitas, efisiensi dan kontribusi sektor pariwisata agar tidak mengalami fluktuasi untuk tahun-tahun berikutnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni Pemerintah harus tetap memperhatikan konsistensi yang selaras dengan tren (rasio) yang cenderung masih fluktuasi dan perlunya peningkatan efektivitas, efisiensi dan kontribusi melalui pemberdayaan potensi daya tarik wisata dengan memperbanyak kegiatan di spot pariwisata yang mengundang minat wisatawan datang yang membuat peningkatan realisasi penerimaan sektor

pariwisata serta lebih ketat lagi terhadap penertiban retribusi izin usaha bidang pariwisata, pajak hotel, pajak hiburan ataupun pajak restoran yang masih belum terdaftar atau disebut dengan ekstentifikasi sehingga akan menambah peningkatan pemasukan serta kelengkapan data keuangan untuk sektor pariwisata yang tentunya akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah.

2. Bagi Peneliti Lainnya

- a. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperluas jangkauan populasi dan sampel penelitian dengan sektor lain yang menjadi pendukung pendapatan asli daerah.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang berpotensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.
- c. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat membahas korelasi antar variabel independen supaya lebih mendalami dan membahas terkait perbedaan rata-rata antar variabel independen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alim, N.B. dan P.H. Anwar. 2016. Studi Krisis Realisasi Anggaran Sektor Publik Ditinjau Dari Dalam Aplikatif Kartu Indonesia Sehat. E-ISSN-2597-9116. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Andriansyah. 2014. Analisa Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi*. Vol XV, No.1, Maret 2014.
- Anisa, N. M. 2012. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Volume 1, Nomor 1. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya.
- Aprialdi, F. 2017. Peran Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Skripsi*. Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Arditia, R. 2013. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi UNESA*. E-ISSN: 2686-438X. Volume 1, Nomor 3. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Aznenda. 2017. Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Jurnal Dimensi*. ISSN: 2085-9996. Volume 6, Nomor 2, Halama 235-255. Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan Batam.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Danyanto., S, dan B. Widarno. 2016. Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 No. 4 Desember 2016: 398 – 406. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Depparpostel RI. 1985. Keputusan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVV105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.
- Devas, N., Binder. B, Booth. A, Davey. K, dan Kelley. R. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Press: Jakarta.
- Dewi, W. R., Djudi. M, dan Nuzula N. F. 2016. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Volume 10 Nomor 1. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

- Djumhana, M. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dritsakis, N. 2004. *Tourism as a long-run economic growth factor: an empirical investigation for Greece using causality analysis*. Department of Applied Informatic Undangs, University of Macedonia, Economics and Social Sciences, 156 Egnatia Street, PO Box 1591, 540 06 Thessaloniki, Greece. *Tourism Economics*,, 305–316.
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Pers.
- Ersita, M, dan I. Elim. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Volume 4 Nomor 1 Maret 2016, Halaman 889-897. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Ensiklopedi. 1992. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Jilid 1*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Fadly, M. A. 2020. Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2018). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke-4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, E. 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*. 2549-6204. Volume 2 Nomor 1. Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang: Banda Aceh.
- Guritno. 1992. *Bunga Rampai Administrasi Publik*. Gadjra Mada University: kampus Ekonomi.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanipah, S. dan D. Pratomo. 2015. Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kota Bandung Periode 2009-2013). ISSN 2355-9357, 2(3), 3274–3286. *E-proceeding of management*. Vol.2, No. 3.
- Hasan, I. 2001. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferentif)*. Edisi kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Himmawan. Arief, dan W, Djoko, 2014. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). *Jurnal Bisnis dan*

- Ekonomi (JBE)*. ISSN: 1412-3126. Volume 21, Nomor 2, Halaman 189 –205, September 2014.
- Ifa, K. 2017. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi dan Pajak* Volume 1 No 2 , Hal :1-13. STIE Widya Gama Lumajang.
- Indriantoro, N., Supomo, dan Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jariyah, A. 2020. Analisis Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bantaeng). *Artikel Ilmiah Akuntansi*. Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
- Jaya, B. F. dan P. R. Nopiana. 2019. Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. E-ISSN : 2714-593X. Volume 1 Nomor 2. Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam.
- Julastiana, Y. 2012. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*. ISSN 2302-8556. Volume 2 Nomor 1 Desember. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Karina, N. dan N. Budiarmo. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Fakultas Ekonomoi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi , *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174 Volume 4 Nomor 1, Hal. 715-722. Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Kawa, E. P. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- KBBI. 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Online*: Diakses 15 April 2021, <http://kbbi.web.id/pusat>.
- Kristiani, I. dan M. Bala. 2019. Analisis Sektor Pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara, *Jurnal Akuntansi* Volume 19 Nomor 1. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Kurniawan, N. A. C., F. H. Murti, dan D. S. P. Astuti. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 – 2014. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*. Volume 12 Nomor 3 Halaman 372-381. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Lasmini, dan W. Astuti. 2019. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. ISSN : 2442-4439. *Jurnal EBBANK*. Volume 10 Nomor 1 Halaman 29-40. Universitas Widya Mataram.

- Luwunaung, C., Y. Tawas, dan J. Kambey. 2020. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2015-2019. e-ISSN 2774-6976. *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 1 No. 3 , 99-108. Akuntansi FE Universitas Negeri Manado.
- Mahmudi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta.
- _____. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardiana, G. A. H. 2021. Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. e-ISSN 2302-8556. *Jurnal Akuntansi Udayana*, Vol 31 No.1 Hal. 259-274. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
- _____. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
- Martoyo, S. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Mila, S., Y. L. Utami, dan F. Trististiawan. 2021. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. ISSN 2356-2439. Volume 8 Nomor 1 April 2021. Halaman 29-43.
- Melda, H. 2020. Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi . Universitas Negeri Padang: Padang.
- Memah, E. W. 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Volume 1 Nomor 3, Juni 2013, Halaman 871-881. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Menkes RI. 1989. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang Persyaratan Rumah Makan.
- Mikha, D. 2010. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi*, Volume 5, Nomor 1, ISSN 1907 – 1442, Hal : 66-79.
- Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174. Vol.1 No.4, Hal. 374-382. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

- Mukhtar, H. A. dan Mardalena. 2016. *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Informatif dan Komitmen Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mustika, A. W, dan I. Farida, 2014. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Volume 3 Nomor 6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Nur, W. Q. 2017. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta.
- Nuraina, E. dan Anggita L.W. 2014. Analisis Potensi Pariwisata Bendungan Gonggang Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan.. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Vol.3, No.1. Pendidikan Akuntansi. IKIP PGRI Madiun.
- Oktarina, Irene. 2010. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Puspitasari, E. R. A, dan A. Rohman. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal Of Accounting*. ISSN (Online): 2337-2806. Volume 3 Nomor 4 Tahun 2014 Halaman 1. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Puspitayanti. 2019. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kabupaten Bulukumba Tahun 2006-2010). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Putri, V. (2010). Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*. 2 (1) : 37-46.
- Rantow, B. P. 2014. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo . *Jurnal Akuntansi* Volume XVIII Nomor 01, Januari 2014: 141-150. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Republik Indonesia. 1990. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata.

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses pada 2 Juli 2021, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-97UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I.
- Republik Indonesia. Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Makara, Sosial Humaniora. Volume VII, No. 2 Desember 2003. Halaman 49-53.
- Rini Y. T. C. 2017. *The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9 (2), ISSN 2086-1575 E-ISSN 2502-7115 *Magister Program of Economic Science University of Mataram* , 251-256.
- Rizka, H. A. W., Suharno, dan Djoko Kristianto. 2019. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 – 2017 (Studi Kasus pada Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 15 No. 1 Maret 2019: 31 – 38. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Sari, N. K. I. 2014. Peranan Retribusi Objek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus pada Wisata Religi Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik). *Jurnal Akuntansi AKUNESA* Vol 3 Nomor 1. Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

- Senduk, M., D. P.E. Saerang dan J. Morasa. 2020. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran Pada Hotel Whiz Prime Manado. *Jurnal Akuntansi* Volume 15 Nomor 1, 42-47. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sam Ratulangi.
- Setiono, Hari. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Keuangan*. ISSN Online : 2615-7306 ISSN Cetak : 2615-7314. Prive;Volume 1, Nomor 1, Maret 2018. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit.
- Sudaryo, Y., Syarif D, dan Sofiati N.A. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Andi.
- Sugiarto, Kukuh. 2018. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016. Artikel Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Nusantara PGRI Kediri: Kediri.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardi. 2011. Peranan Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata Baturaden Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas. *Majalah Ilmiah Ekonomika*, volume 14 Nomor 3.
- Sukmawati, M. dan J. F. Ishak. 2007. Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Industrial Workshop and National Research*. ISBN: 978-979-3541-59-4. Halaman 1056-1068. Politeknik Negeri Bandung
- Sunyoto, D. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Yogyakarta: *Center for Academic Publishing Service*.
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartingsih. 2008. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume VII, No. 2 September 2008. Halaman 162-173.
- Somnia, T. R 2019. Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara: Yogyakarta.
- Tanjung, N. M. 2019. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.
- Triyono, A., Albertris, dan E. Siswati. 2021. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Perhotelan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun

2013-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*. ISSN 1411-8939. Halaman 669-676. Universitas Batanghari Jambi.

- Utami, T. 2021. Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area*: Medan.
- Wahyuni, R. A. P, dan K. Arif. 2020. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*. Volume 1 Nomor 1. October. Politeknik Negeri Bandung.
- Wibowo, H. R. A. dan Suharno D. K. 2017. Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 – 2017 (Studi Kasus pada Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Volume 15 No. 1 Maret 2019: 31 – 38. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Yoduke, R. dan S. Ayem. 2015. Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*. Volume 3 Nomor 2 Desember 2015. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.